Kemenkes
BBKK Tanjung Priok

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PROFIL TAHUN 2025

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK









CEGAH TANGKAL | PELAYANAN BERKUALITAS | KOLABORASI LINTAS SEKTOR | INDONESIA SEHAT DAN TANGGUH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Profil Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Profil ini disusun sebagai media informasi mengenai tugas dan fungsi, kelembagaan, sumber daya, wilayah kerja, pelayanan, serta pelaksanaan kegiatan BBKK Tanjung Priok dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BBKK Tanjung Priok dalam memperkuat pelaksanaan kekarantinaan kesehatan melalui surveilans epidemiologi, pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kedaruratan kesehatan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan akuntabel.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBKK Tanjung Priok terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, penguatan Zona Integritas juga terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan membangun budaya kerja yang berintegritas serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kami berharap Profil BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 dapat menjadi salah satu media publikasi data dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa profil ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga profil ini dapat memberikan gambaran mengenai dedikasi seluruh insan BBKK Tanjung Priok dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia yang sehat dan tangguh.

.

Jakarta, 23 Ferbruari 2026
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok



Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH
NIP 196911121992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK vii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang **1**
2. Struktur Organisasi **2**
3. Tugas Pokok Dan Fungsi **4**
4. Peta Wilayah **4**
5. Gambar Gedung BBKK Tanjung Priok **5**
BAB II 6
PENCAPAIAN KEGIATAN 6
1. Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan ... 6
A. Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara 7
B. Deteksi Dini & Respons Cepat **8**
C. Penyelidikan Epidemiologi 9
D. Pengolahan & Analisis Data Surveilans 9
E. Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan 10
F. Kesiapsiagaan KLB/Wabah/KKM 10
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang 12
A. Pengawasan Faktor Risiko pada Alat Angkut 13
B. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Alat Angkut 14
C. Pengawasan Faktor Risiko pada Barang 14
D. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan pada Barang 15
E. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan 16
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan 18
A. Pengawasan Kualitas Air 19
B. Pengawasan Higiene dan Sanitasi 20
C. Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan 21
D. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 21
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus 23

A. Pelayanan Kesehatan 23
B. Skrining Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan 24
C. Vaksinasi dan Penerbitan ICV 25
D. Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus 25
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas 27
A. Pengembangan Layanan Publik 28
B. Pembangunan Zona Integritas 29
C. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 31
D. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 31
E. Pengelolaan Media Informasi 32
F. Pengembangan Inovasi Pelayanan 32
6. Administrasi Umum 33
A. Pengelolaan administrasi kepegawaian 33
B. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 34
C. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas dan arsip 34
D. Pengelolaan administrasi keuangan 35
E. Pengelolaan administrasi perencanaan, program dan pelaporan 35
F. Pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran 36
7. Wilayah Kerja 36
A. Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda 36
B. Wilayah Kerja Pelabuhan Kali Baru 38
C. Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol 39
D. Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman 41
E. Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara 42
BAB III 45
PENUNJANG KEGIATAN 45
1. Keuangan 45
2. Program dan Laporan 45
3. Sumber Daya Manusia 46
4. Sarana dan Prasaranan 49
5. Penghargaan yang diterima 50
BAB IV 52
PENUTUP 52
1. Kesimpulan 52
2. Saran 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan 17
Tabel 2. 2 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda 37
Tabel 2. 3 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru 39
Tabel 2. 4 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa 40
Tabel 2. 5 Petugas di Wilayah Kerja Samudra Nizam Zachman 42
Tabel 2. 6 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke 43
Tabel 3. 1 Realisasi DIPA dan penerimaan PNBP 45
Tabel 3. 2 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan 47
Tabel 3. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 48
Tabel 3. 4 Sarana dan prasarana 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BBKK Tanjung Priok 3
Gambar 1. 2 Peta Wilayah BBKK Tanjung Priok 5
Gambar 1. 3 Gedung Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok 5
Gambar 2. 1 Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan 6
Gambar 2. 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang 12
Gambar 2. 3 Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan 18
Gambar 2. 4 Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus 23
Gambar 2. 5 Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas 27
Gambar 2. 6 Tim Kerja Administrasi Umum 33
Gambar 2. 7 Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda 37
Gambar 2. 8 Wilayah Kerja Pelabuhan Kali Baru 38
Gambar 2. 9 Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol 39
Gambar 2. 10 Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman 41
Gambar 2. 11 Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman 42
Gambar 3. 1 Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik BBKK Tanjung Priok 51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan..... 46

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pintu masuk dan keluar utama pergerakan orang, alat angkut, dan barang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Tingginya mobilitas tersebut dapat meningkatkan potensi masuk dan keluarnya penyakit menular maupun faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok memiliki peran strategis dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BBKK mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025, BBKK Tanjung Priok menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meliputi surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengendalian faktor risiko, serta kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian yang berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dan disajikan secara sistematis sebagai gambaran pelaksanaan program, hasil kegiatan, capaian kinerja, serta kondisi sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan media publikasi berupa Profil BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 yang dapat memberikan informasi secara ringkas, jelas, dan komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kinerja BBKK Tanjung Priok selama satu tahun.

Hasil yang disajikan dalam profil ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, evaluasi, dan pembelajaran dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Data dan informasi mengenai capaian kegiatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, wilayah kerja, pelayanan, serta dukungan anggaran dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan manajemen BBKK Tanjung Priok dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap program dan kegiatan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Struktur Organisasi

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kekarantinaan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyelenggaraan organisasi BBKK Tanjung Priok mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, serta berada dalam kerangka organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBKK Tanjung Priok dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, organisasi didukung oleh unsur administrasi, kelompok jabatan fungsional, instalasi, serta wilayah kerja yang menjalankan fungsi teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2025 diperkuat melalui pembagian tugas, yaitu:

1) **Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan**, yang berperan dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi, pengumpulan dan analisis data, deteksi dini, diseminasi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
2) **Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang**, yang melaksanakan pengawasan kesehatan alat angkut dan barang, pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan, serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berkaitan dengan alat angkut dan barang.
3) **Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan**, yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan, termasuk kualitas air, higiene dan sanitasi, tempat pengelolaan pangan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta faktor risiko lingkungan lainnya.
4) **Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus**, yang melaksanakan pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang, pelayanan kesehatan, skrining, vaksinasi, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta dukungan dalam penanganan situasi khusus di wilayah kerja.
5) **Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas**, yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat, pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pengembangan inovasi, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

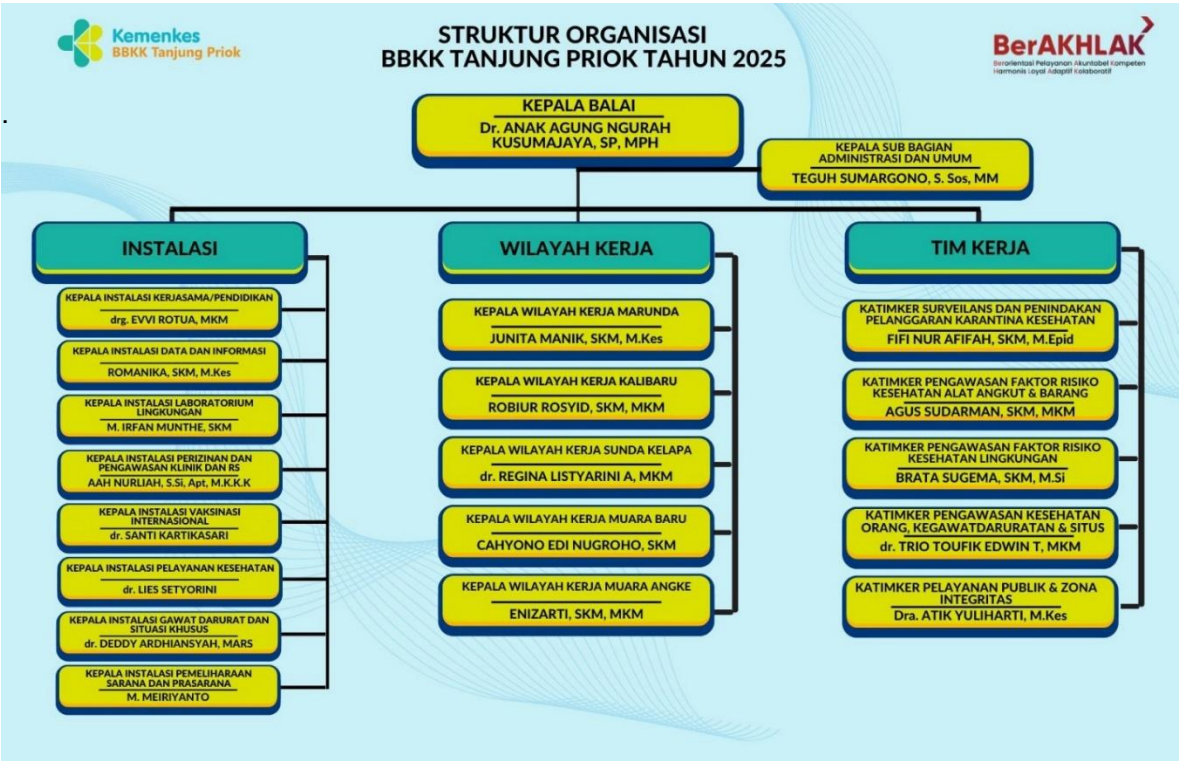
Dalam pelaksanaan tugasnya, kelima Tim Kerja tersebut didukung oleh 5 Wilayah Kerja, yaitu:

1) Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda
2) Wilayah Kerja Pelabuhan Kali Baru
3) Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol
4) Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman
5) Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara

Selain unsur tersebut, BBKK Tanjung Priok didukung oleh Subbagian Administrasi Umum yang memberikan dukungan administrasi dan manajemen dalam penyelenggaraan organisasi, serta unsur pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel. Sinergi antarunsur organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, pengawasan faktor risiko, pelayanan publik, serta perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BBKK Tanjung Priok



3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, tugas pokok dan fungsi BKK adalah sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

2) Fungsi

a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
k. pelaksanaan urusan administrasi UPT BKK.

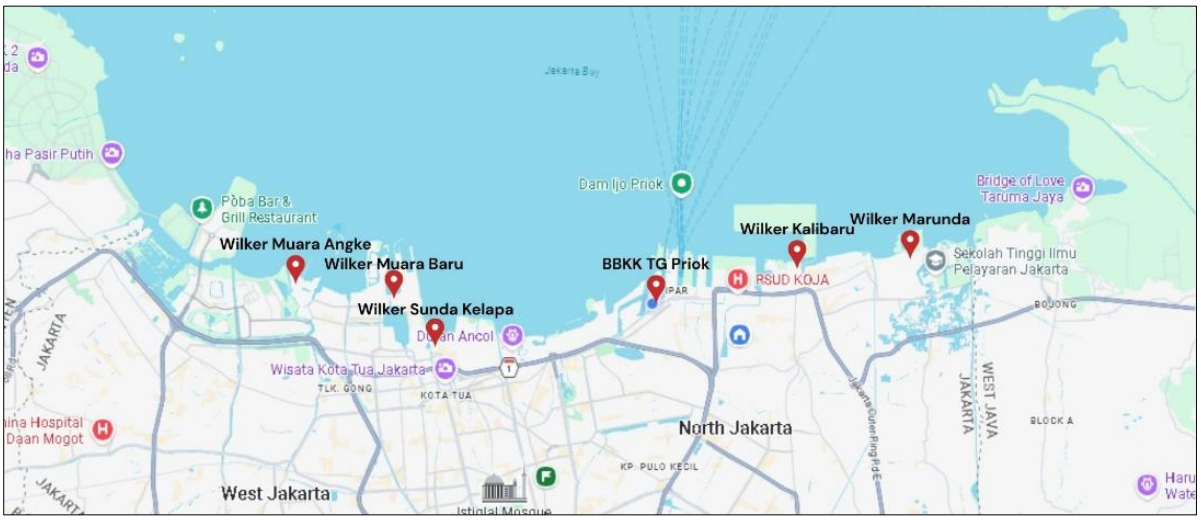
4. Peta Wilayah

BBKK Tanjung Priok memiliki wilayah kerja yang mencakup kawasan pelabuhan dan pesisir di wilayah Jakarta Utara. Dalam melaksanakan tugas kekarantinaan kesehatan, BBKK Tanjung Priok didukung oleh beberapa wilayah kerja yang menjadi titik pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respons terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan.

Wilayah kerja BBKK Tanjung Priok meliputi Kantor Induk Tanjung Priok, Wilayah Kerja Marunda, Kalibaru, Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol, Muara Baru, serta Muara Angke. Keberadaan wilayah kerja tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengawasan

kekarantinaan kesehatan secara optimal pada berbagai pintu masuk dan kawasan Pelabuhan.

Gambar 1. 2 Peta Wilayah BBKK Tanjung Priok



5. Gambar Gedung BBKK Tanjung Priok

Gambar 1. 3 Gedung Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok



BAB II
PENCAPAIAN KEGIATAN

1. Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Gambar 2. 1 Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan



Surveilans kekarantinaan kesehatan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok merupakan salah satu upaya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kegiatan surveilans dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan berkesinambungan mengenai kondisi kesehatan di wilayah pelabuhan, sehingga setiap kejadian yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat.

Sebagai salah satu pintu masuk negara dengan mobilitas orang, alat angkut, dan barang yang tinggi, wilayah kerja BBKK Tanjung Priok memiliki potensi terhadap masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, penyakit baru maupun penyakit yang muncul kembali. Oleh karena itu, pelaksanaan surveilans menjadi bagian penting dalam upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, khususnya dalam mendukung keamanan kesehatan pada transportasi laut nasional maupun internasional.

Melalui kegiatan surveilans, BBKK Tanjung Priok melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyebarluasan informasi kesehatan sebagai dasar dalam menentukan langkah pencegahan dan pengendalian. Kegiatan tersebut juga didukung dengan

koordinasi dan jejaring dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap indikasi kejadian penyakit maupun faktor risiko kesehatan.

Selain kegiatan surveilans, Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan juga berperan dalam penindakan terhadap pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penindakan dilakukan sebagai bagian dari penguatan kepatuhan terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan serta untuk memastikan upaya perlindungan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara dapat berjalan secara efektif.

Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi dilaksanakan melalui:

A. Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara

Surveilans epidemiologi di pintu masuk negara dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendeteksi secara dini penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melakukan pengamatan terhadap kondisi kesehatan alat angkut, awak kapal, penumpang, serta kejadian kesehatan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok sebagai bagian dari upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.

Pelaksanaan surveilans dilakukan melalui pemantauan informasi kesehatan dan sinyal kewaspadaan dini, termasuk pemantauan kondisi kesehatan pada kapal dan terminal penumpang. Di Terminal Penumpang Nusantara II, kegiatan surveilans epidemiologi dilaksanakan secara terjadwal dengan dukungan petugas yang berjaga selama 24 jam setiap hari, sehingga informasi mengenai kejadian kesehatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat.

Sepanjang tahun 2025, surveilans juga dilakukan terhadap kejadian penyakit di wilayah kerja. Salah satu pelaksanaannya adalah Penyelidikan Epidemiologi kejadian Chikungunya di wilayah Cilincing pada 9 Mei 2025, yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kasus dan mendukung deteksi dini terhadap penyakit yang berpotensi berkembang menjadi KLB atau wabah.

Hasil pemantauan surveilans menjadi dasar bagi Tim Kerja dalam melakukan verifikasi sinyal, penilaian risiko, penyelidikan epidemiologi, serta menentukan respons yang diperlukan**.** Pada tahun 2025, seluruh 10 sinyal KLB dan bencana yang diterima berhasil direspons dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan kelengkapan respons sesuai target yang ditetapkan.

1) Surveilans pada Kapal

   Tim Kerja melaksanakan pemantauan kondisi kesehatan pada kapal yang memasuki wilayah kerja BBKK Tanjung Priok melalui pengamatan informasi kesehatan awak kapal, penumpang, serta kejadian penyakit selama pelayaran. Kegiatan ini dilakukan

untuk mendeteksi secara dini adanya penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah dan memastikan kejadian tersebut dapat segera ditindaklanjut.

2) Surveilans pada Awak Kapal

   Pengamatan kesehatan awak kapal dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap penyakit yang dapat berpotensi menyebar di lingkungan kapal maupun wilayah pelabuhan. Informasi mengenai kondisi kesehatan awak kapal menjadi salah satu sumber penting dalam penilaian risiko dan penentuan tindak lanjut kekarantinaan Kesehatan.

3) Surveilans pada Penumpang

   Surveilans terhadap penumpang dilakukan melalui pemantauan kejadian kesehatan yang ditemukan pada saat kedatangan maupun selama berada di area pelabuhan. Setiap informasi mengenai penumpang yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit berpotensi menular menjadi bagian dari kewaspadaan dini dan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta penyelidikan epidemiologi sesuai kebutuhan.

4) Surveilans pada Wilayah Kerja

   Surveilans epidemiologi juga dilaksanakan secara aktif di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok untuk memantau perkembangan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat. Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan informasi penyakit serta deteksi sinyal kewaspadaan dini di wilayah kerja, sehingga perubahan situasi kesehatan dapat diketahui lebih awal dan menjadi dasar pelaksanaan respons.

5) Surveilans Kejadian Kesehatan yang Berpotensi KLB/Wabah

   Tim Kerja melakukan pemantauan dan respons terhadap berbagai kejadian kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi KLB atau wabah. Setiap sinyal yang diterima dilakukan verifikasi dan penilaian untuk menentukan kebutuhan tindak lanjut, termasuk penyelidikan epidemiologi. Pada tahun 2025, 10 dari 10 sinyal KLB dan bencana berhasil direspons dalam waktu kurang dari 24 jam, menunjukkan kesiapsiagaan Tim Kerja dalam mendeteksi dan merespons kejadian kesehatan secara cepat.

B. Deteksi Dini & Respons Cepat

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan deteksi dini terhadap setiap sinyal atau informasi kejadian kesehatan yang berpotensi menjadi ancaman kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Deteksi dilakukan melalui pemantauan informasi kesehatan, kewaspadaan dini, serta pengamatan terhadap kejadian penyakit pada alat angkut, awak kapal, penumpang, dan masyarakat di wilayah kerja.

Setiap sinyal yang diterima selanjutnya dilakukan verifikasi dan penilaian awal untuk menentukan tingkat risiko serta kebutuhan respons. Apabila ditemukan indikasi kejadian yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Tim Kerja segera melakukan tindakan sesuai hasil penilaian, termasuk penyelidikan epidemiologi dan pemantauan perkembangan kejadian.

Kinerja tahun 2025 menunjukkan kesiapsiagaan yang baik, dengan 10 dari 10 sinyal KLB dan bencana berhasil direspons dalam waktu kurang dari 24 jam dengan kelengkapan respons sesuai target. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Tim Kerja dalam memastikan setiap potensi ancaman kesehatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat

C. Penyelidikan Epidemiologi

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) terhadap kejadian atau informasi kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kejadian secara lebih lengkap, mengidentifikasi kasus dan faktor risiko, serta mendukung deteksi dini terhadap kemungkinan penyebaran penyakit.

Pelaksanaan PE dilakukan dengan mengumpulkan dan memverifikasi informasi kejadian, mengidentifikasi kasus serta kontak atau kelompok yang berisiko terpapar, dan melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kejadian. Hasil penyelidikan menjadi dasar bagi Tim Kerja dalam menentukan langkah pengendalian dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pada tahun 2025, salah satu pelaksanaan PE dilakukan terhadap kejadian Chikungunya di wilayah Cilincing pada 9 Mei 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim epidemiolog untuk memperoleh data terkait kejadian dan mendukung deteksi dini penyakit yang berpotensi berkembang menjadi KLB atau wabah.

D. Pengolahan & Analisis Data Surveilans

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data surveilans sebagai dasar dalam memantau perkembangan situasi kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Data yang diperoleh dari hasil pemantauan penyakit, kejadian kesehatan, serta sinyal kewaspadaan dini diolah untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola kejadian penyakit, melihat kecenderungan perkembangan kasus, mengenali faktor risiko, serta menentukan potensi ancaman kesehatan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Informasi hasil analisis kemudian disajikan dan disebarluaskan sebagai bahan kewaspadaan dini dan respons

terhadap kejadian kesehatan. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pengolahan data surveilans mendukung pemantauan situasi kesehatan di berbagai wilayah kerja BBKK Tanjung Priok, termasuk pemantauan melalui SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons) serta pengumpulan informasi kejadian penyakit. Hasil pengolahan data menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan verifikasi, penyelidikan epidemiologi, maupun respons terhadap sinyal kesehatan yang ditemukan.

E. Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap potensi atau dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang ditemukan di pintu masuk negara maupun wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, setiap dugaan pelanggaran dilakukan identifikasi, pemantauan, dan tindak lanjut berdasarkan informasi serta temuan di lapangan. Tim Kerja juga berperan dalam menyiapkan proses penindakan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran sesuai ketentuan kekarantinaan kesehatan.

Pada tahun 2025, fungsi penindakan diperkuat melalui peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan dokumen dan persyaratan kekarantinaan kesehatan. Hal ini penting mengingat adanya potensi pemalsuan atau penerbitan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara.

F. Kesiapsiagaan KLB/Wabah/KKM

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) sebagai bagian dari upaya memastikan BBKK Tanjung Priok siap menghadapi setiap ancaman kesehatan yang berpotensi terjadi di pintu masuk negara maupun wilayah kerja. Kesiapsiagaan dilaksanakan melalui pemantauan situasi dan sinyal kewaspadaan dini, surveilans epidemiologi, penyelidikan epidemiologi, penyiapan respons terhadap kejadian, serta pengujian kesiapan melalui simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah. Surveilans juga diperkuat pada situasi khusus seperti Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, serta ketika terdapat KLB, wabah, atau KKM. Kegiatan Kesiapsiagaan Tahun 2025, yaitu:

1) Pemantauan Sinyal Kewaspadaan Dini

Tim Kerja melakukan pemantauan terhadap informasi dan sinyal kejadian kesehatan yang berpotensi menjadi KLB, wabah, atau kedaruratan kesehatan. Setiap sinyal yang

diterima menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi dan penentuan kebutuhan respons lebih lanjut.

2) Respons Cepat terhadap Sinyal KLB dan Bencana

   Setiap sinyal yang teridentifikasi ditindaklanjuti secara cepat sesuai dengan karakteristik dan tingkat risikonya. Pada tahun 2025, 10 dari 10 sinyal KLB dan bencana berhasil direspons dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan kelengkapan respons sesuai target.

3) Penyelidikan Epidemiologi

   Penyelidikan Epidemiologi dilakukan apabila ditemukan informasi atau kejadian penyakit yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran kejadian, mendukung deteksi dini, serta menjadi dasar dalam menentukan tindakan pengendalian. Salah satu kegiatan tahun 2025 adalah PE terhadap kejadian Chikungunya di Cilincing pada 9 Mei 2025.

4) Peningkatan Kewaspadaan pada Situasi Khusus

   Surveilans epidemiologi diperkuat pada periode atau situasi yang memerlukan peningkatan kewaspadaan, antara lain Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, serta pada situasi KLB/Wabah/KKM. Di Terminal Penumpang Nusantara II dan di setiap wilayah kerja BBKK Tanjung Priok, petugas surveilans dijadwalkan melakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari.

5) Simulasi Penanggulangan Penyakit Berpotensi Wabah

   Kesiapan menghadapi kejadian kedaruratan juga diperkuat melalui simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah. Pelaksanaannya mencakup penyusunan skenario, *Table Top Exercise*, latihan lapangan/gladi, hingga pelaksanaan simulasi. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan rencana kontingensi dan mekanisme respons apabila terjadi kondisi kedaruratan kesehatan.

2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang

Gambar 2. 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang



Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang memiliki peran strategis dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit melalui alat angkut dan barang yang melintas di pintu masuk negara. Pengawasan dilakukan terhadap kapal beserta muatannya melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, kondisi kesehatan kapal, awak kapal, serta identifikasi faktor risiko yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Pelaksanaan pengawasan mencakup kedatangan kapal dari dalam maupun luar negeri, pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan, pemeriksaan kesehatan dan sanitasi kapal, pengawasan tindakan penyehatan alat angkut, serta pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif).

Setiap faktor risiko yang ditemukan menjadi dasar untuk dilakukan tindakan pengendalian sesuai ketentuan kekarantinaan kesehatan. Pada tahun 2025, pelaksanaan pengawasan menunjukkan capaian yang kuat. Sebanyak 50.492 alat angkut diperiksa sesuai standar karantina, melampaui target 41.806 alat angkut. Selain itu, diterbitkan 3.886 COP, 43.777 PHQC, dan 109 SSCC, yang menunjukkan tingginya volume pengawasan dan pelayanan dokumen kesehatan alat angkut. Pengendalian faktor risiko juga dilakukan melalui tindakan penyehatan alat angkut.

Pada tahun 2025, 82 kapal mendapatkan tindakan penanggulangan faktor risiko, terdiri atas 65 kapal melalui fumigasi dan 17 kapal melalui desinseksi. Tindakan tersebut ditujukan untuk mengendalikan faktor risiko pada alat angkut dan mencegah penyebaran penyakit melalui kapal. Berikut kegiatan pengawasan faktor risiko dilaksanakan melalui:

A. Pengawasan Faktor Risiko pada Alat Angkut

Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut merupakan salah satu kegiatan utama Tim Kerja dalam memastikan setiap kapal yang datang dan berangkat melalui wilayah kerja BBKK Tanjung Priok berada dalam kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengawasan dilakukan terhadap kapal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan kondisi kesehatan kapal, awak kapal, serta faktor risiko yang dapat menjadi media penularan penyakit.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pemeriksaan kondisi kesehatan dan faktor risiko pada alat angkut, serta pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kekarantinaan kesehatan. Hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut dan penerbitan dokumen kesehatan kapal sesuai dengan hasil pengawasan. Untuk kapal dari luar negeri, pengawasan juga menjadi dasar dalam penerbitan *Free Pratique*.

Selain pemeriksaan rutin, Tim Kerja melakukan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut apabila ditemukan faktor risiko yang memerlukan pengendalian. Pada tahun 2025, tindakan penyehatan dilakukan terhadap 82 kapal, terdiri dari 65 kapal melalui fumigasi dan 17 kapal melalui desinseksi. Kegiatan tersebut bertujuan mengendalikan faktor risiko pada kapal dan mencegah penyebaran penyakit melalui alat angkut.

Dari sisi capaian, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 50.492 alat angkut sesuai standar karantina, melebihi target sebanyak 41.806 alat angkut atau mencapai 120,04%. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengawasan alat angkut dalam mendukung upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan faktor risiko pada alat angkut :

1) Pemeriksaan Alat Angkut

   Melaksanakan pemeriksaan kapal sesuai standar kekarantinaan kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan dan faktor risiko yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

2) Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Kapal

   Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen kesehatan kapal sebagai bagian dari proses pengawasan kekarantinaan kesehatan.

3) Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan

   Melakukan pengamatan terhadap faktor risiko kesehatan pada alat angkut, awak kapal, dan kondisi kapal yang berpotensi menjadi sumber atau media penularan penyakit.

4) Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut

   Melakukan pengawasan terhadap tindakan fumigasi dan desinseksi sebagai upaya pengendalian faktor risiko pada kapal. Tahun 2025 tercatat 82 kapal mendapatkan tindakan penyehatan.

5) Penerbitan Dokumen Kesehatan Alat Angkut

   Hasil pengawasan menjadi dasar penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan.

B. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Alat Angkut

Pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut merupakan bagian penting dari pelaksanaan kekarantinaan kesehatan untuk memastikan bahwa setiap kapal yang datang dan berangkat melalui wilayah kerja BBKK Tanjung Priok memenuhi persyaratan kesehatan**.** Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan pengawasan kedatangan kapal, baik kapal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan dokumen kesehatan kapal, informasi kesehatan awak kapal, serta faktor risiko yang dilaporkan.

Melalui pemeriksaan dokumen, petugas melakukan verifikasi kelengkapan, kesesuaian, dan validitas informasi kesehatan kapal sebagai dasar untuk menentukan status kesehatan kapal dan tindak lanjut pengawasan. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar dalam penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan, termasuk Certificate of Pratique (COP), Port Health Quarantine Clearance (PHQC), dan Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)**.**

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut:

1) Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal

   Melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen kesehatan yang disampaikan oleh kapal sebagai bagian dari proses pengawasan kekarantinaan kesehatan.

2) Verifikasi informasi kesehatan awak kapal

   Memastikan informasi kesehatan awak kapal yang dilaporkan dapat menjadi bahan dalam penilaian kondisi kesehatan kapal dan identifikasi faktor risiko.

3) Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan

   Informasi dalam dokumen menjadi bagian dari proses pengawasan bersama dengan hasil pemeriksaan alat angkut dan faktor risiko kesehatan yang ditemukan oleh petugas.

C. Pengawasan Faktor Risiko pada Barang

Pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang merupakan bagian dari pelaksanaan kekarantinaan kesehatan untuk memastikan barang yang keluar maupun masuk melalui wilayah kerja BBKK Tanjung Priok tidak menjadi media pembawa penyakit atau faktor risiko kesehatan.

Pengawasan dilakukan terhadap barang yang termasuk Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKABA), melalui pemeriksaan terhadap dokumen, kondisi fisik barang, serta pengambilan sampel apabila diperlukan. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan apakah barang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diberikan dokumen kesehatan sesuai ketentuan.

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut:

1) Pemeriksaan fisik barang

   Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik barang untuk mengidentifikasi adanya potensi faktor risiko kesehatan, termasuk kesesuaian jenis dan kondisi barang dengan informasi yang disampaikan.

2) Pemeriksaan dokumen barang

   Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen yang menyertai barang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya sebagai bagian dari persyaratan kekarantinaan kesehatan.

3) Pemeriksaan tempat produksi dan penyimpanan

   Apabila diperlukan, pengawasan dapat mencakup pemeriksaan terhadap tempat produksi maupun penyimpanan untuk memastikan proses penanganan barang tidak menimbulkan risiko kesehatan.

4) Pengambilan dan pemeriksaan sampel OMKABA

   Terhadap barang yang memerlukan pengujian, dilakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Pada tahun 2025, pengambilan sampel OMKABA dilakukan pada sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Cilegon, dan Bandung, dengan pemeriksaan laboratorium di Labkesda DKI Jakarta. Hasil pemeriksaan pada sampel yang tercantum dalam laporan menunjukkan barang memenuhi syarat.

5) Pengawasan lalu lintas OMKABA

   Pengawasan dilakukan terhadap pergerakan OMKABA, baik dalam rangka kegiatan ekspor maupun impor, untuk memastikan barang yang melalui wilayah pengawasan memenuhi persyaratan kesehatan.

6) Penerbitan dokumen Kesehatan

   Hasil pemeriksaan dan pengujian menjadi dasar dalam proses penerbitan dokumen kesehatan bagi barang yang telah memenuhi persyaratan.

D. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan pada Barang

Pemeriksaan dokumen kesehatan pada barang merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas barang, khususnya OMKABA, yang dilakukan untuk memastikan barang yang

keluar maupun masuk melalui wilayah kerja BBKK Tanjung Priok dilengkapi dokumen dan persyaratan kesehatan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen yang menyertai barang. Hasil pemeriksaan dokumen menjadi bagian dari proses penilaian pemenuhan persyaratan kesehatan dan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat kesehatan barang.

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan dokumen kesehatan pada barang:

1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen
   Memeriksa dokumen kesehatan dan dokumen pendukung yang menyertai barang untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi.
2) Verifikasi kesesuaian dokumen
   Memastikan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dengan jenis, jumlah, dan peruntukan barang yang diajukan.
3) Verifikasi keabsahan dokumen
   Melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen sebagai bagian dari pengawasan kekarantinaan Kesehatan.
4) Pemeriksaan dokumen OMKABA ekspor dan impor
   Melakukan pemeriksaan dokumen terhadap lalu lintas OMKABA yang akan keluar maupun masuk melalui wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.
5) Penerbitan sertifikat Kesehatan
   Setelah persyaratan dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat kesehatan barang sesuai ketentuan.

E. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan merupakan tahapan pelayanan yang dilakukan setelah pemeriksaan alat angkut dan pemenuhan persyaratan kekarantinaan kesehatan. Dokumen diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian petugas terhadap kondisi kesehatan alat angkut serta faktor risiko yang ditemukan. Dokumen layanan kekarantinaan menjadi bukti bahwa alat angkut atau barang telah melalui proses pengawasan kesehatan sesuai ketentuan. Pelayanan ini juga mendukung kelancaran lalu lintas alat angkut dan barang dengan tetap memastikan aspek kesehatan dan kekarantinaan terpenuhi. Dalam pelaksanaan tahun 2025, seluruh kegiatan pemeriksaan alat angkut, penerbitan dokumen kesehatan kapal, pemeriksaan COP, PHQC, serta SSCC terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan dokumen kesehatan pada barang:

1) Verifikasi hasil pemeriksaan

   Melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan alat angkut dan/atau barang sebagai dasar penerbitan dokumen layanan kekarantinaan.

2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan

   Memastikan dokumen pendukung dan persyaratan pelayanan telah lengkap dan sesuai sebelum dokumen diterbitkan.

3) Penerbitan dokumen kekarantinaan alat angkut

   Dokumen yang diterbitkan antara lain Certificate of Pratique (COP), Port Health Quarantine Clearance (PHQC), dan Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) sesuai hasil pemeriksaan dan jenis layanan.

4) Penerbitan dokumen layanan lainnya

   Pelayanan juga mencakup penerbitan dokumen kekarantinaan sesuai kebutuhan dan hasil pemeriksaan, termasuk Surat Bebas Karantina Kapal *(Restricted).*

5) Pencatatan dan dokumentasi layanan

   Setiap dokumen yang diterbitkan dicatat dan didokumentasikan sebagai bagian dari pengelolaan administrasi serta data layanan kekarantinaan.

Tabel 2. 1 Capaian Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan

No	Jenis Dokumen	Target	Realisasi	Capaian
1	COP	3.400	3.886	114,29%
2	PHQC	36.200	43.777	120,93%
3	SSCC	92	109	118,48%
4	Surat Bebas Karantina Kapal (Restricted)	15	15	100%
5	SSCEC	7.642	8.187	107,13%
6	Ship Health Book / Buku Kesehatan Kapal	1.300	1.528	117,54%
7	Health Certificate OMKABA	4.300	4.429	103%
8	P3K	810	865	106,79%

3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Gambar 2. 3 Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan



Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan memiliki peran strategis dalam memastikan kondisi lingkungan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok tetap sehat dan tidak menjadi sumber penularan penyakit. Pelaksanaan tugas diarahkan pada identifikasi, pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di pintu masuk negara.

Pengawasan dilakukan terhadap berbagai komponen lingkungan, antara lain kualitas air, keamanan dan higiene makanan, tempat pengelolaan pangan, jasa boga, tempat-tempat umum, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Kegiatan dilaksanakan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan dan pengujian, pengumpulan serta analisis hasil pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pengendalian apabila ditemukan faktor risiko.

Salah satu pelaksanaan utama adalah pengawasan kualitas air di wilayah pelabuhan, yang mencakup observasi fisik melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pengambilan dan pengujian sampel air, pengolahan serta analisis data, hingga pemberian rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kualitas air.

Selain itu, Tim Kerja melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan memantau indikator seperti kepadatan pinjal, kecoak, lalat, keberadaan larva

Anopheles, serta House Index (HI) pada wilayah perimeter dan buffer. Pada tahun 2025, indikator-indikator pengendalian tersebut mencapai 100%.

Secara keseluruhan, peran Tim Kerja ini merupakan bagian penting dari upaya cegah tangkal penyakit melalui pengendalian faktor risiko lingkungan, sehingga lingkungan pelabuhan dan wilayah kerja BBKK Tanjung Priok dapat tetap aman, sehat, dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta lalu lintas melalui pintu masuk negara. Berikut kegiatan pengawasan faktor risiko risiko lingkungan, yaitu:

A. Pengawasan Kualitas Air

Pengawasan kualitas air merupakan salah satu kegiatan penting Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dalam memastikan ketersediaan air di wilayah pelabuhan memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menjadi faktor risiko penularan penyakit. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala melalui verifikasi laporan pengawasan, observasi fisik melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pengambilan sampel, pemeriksaan kualitas air, serta pengolahan dan analisis hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam menentukan kondisi kualitas air dan menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan apabila ditemukan faktor risiko atau hasil yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan adanya pengendalian terhadap risiko yang ditemukan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan kualitas air mendukung upaya BBKK Tanjung Priok dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang aman dan sehat, sejalan dengan kapasitas inti pelabuhan dalam *International Health Regulations* (IHR) 2005 yang mencakup penyediaan lingkungan yang aman, termasuk ketersediaan air minum di pintu masuk negara. Berikut kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan kualitas air:

1) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)

   Melakukan observasi kondisi sarana dan lingkungan penyediaan air untuk mengidentifikasi potensi faktor risiko kesehatan.

2) Pengambilan Sampel Air

   Melakukan pengambilan sampel air dari lokasi yang menjadi sasaran pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan kualitas air.

3) Pemeriksaan dan Pengujian Kualitas Air

   Melakukan pemeriksaan kualitas air melalui pengujian parameter yang dipersyaratkan untuk mengetahui kesesuaian dengan standar kesehatan.

4) Pengolahan dan Analisis Hasil Pemeriksaan

Mengolah dan menganalisis hasil pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kualitas air serta mengidentifikasi adanya faktor risiko.

5) Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Menyusun rekomendasi perbaikan dan memantau tindak lanjut apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi yang perlu dikendalikan.

Dengan hasil 133 lokus kualitas air bersih menjadi sasaran pemeriksaan dengan minimal dua kali pemeriksaan kimia lengkap dan enam kali pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologis, dan seluruhnya mencapai target 133 lokus atau 100%.

B. Pengawasan Higiene dan Sanitasi

Pengawasan higiene dan sanitasi merupakan salah satu kegiatan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan untuk memastikan tempat pengelolaan pangan (TPP), jasa boga, dan fasilitas yang berkaitan dengan penyediaan makanan di wilayah pelabuhan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan agar makanan dan fasilitas pelayanan tidak menjadi media penularan penyakit.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi higiene dan sanitasi, penilaian terhadap tempat pengelolaan pangan, serta pemantauan pemenuhan persyaratan kesehatan. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan status kelayakan dan tindak lanjut terhadap faktor risiko yang ditemukan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan Higiene dan Sanitasi:

1) Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi TPP/TPM

Melakukan pemeriksaan kondisi kebersihan dan sanitasi tempat pengelolaan makanan untuk memastikan memenuhi persyaratan Kesehatan.

2) Pengawasan Jasa Boga

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa boga di lingkungan pelabuhan untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi.

3) Penilaian Kondisi Sanitasi Fasilitas Pangan

Menilai kondisi fasilitas, sarana, dan lingkungan tempat pengelolaan pangan dalam rangka mengidentifikasi potensi faktor risiko kesehatan.

4) Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan

Mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, serta menentukan kebutuhan pengendaliannya.

5) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Memantau tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, khususnya apabila ditemukan kondisi atau faktor risiko yang memerlukan perbaikan.

Dengan hasil pengawasan terhadap lokus Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) menjadi salah satu indikator kinerja. Sebanyak 84 lokus TPM ditargetkan untuk mendapatkan pemeriksaan minimal dua kali dan seluruhnya terealisasi sesuai target yaitu 100%.

C. Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan

Pengawasan faktor risiko lingkungan dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok tidak menjadi sumber atau media penularan penyakit. Kegiatan mencakup pemeriksaan lingkungan, pengawasan tempat dan fasilitas umum, serta identifikasi faktor risiko kesehatan yang ditemukan di lapangan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan faktor risiko lingkungan:

1) Inspeksi Kesehatan Lingkungan
   Melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi potensi faktor risiko Kesehatan.
2) Pemeriksaan Tempat dan Fasilitas Umum
   Menilai kondisi kebersihan, sanitasi, dan kesehatan lingkungan pada tempat serta fasilitas umum di wilayah pelabuhan.
3) Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan
   Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi sumber atau media penularan penyakit.
4) Pengendalian Faktor Risiko
   Melakukan atau merekomendasikan tindakan pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
5) Pemantauan dan Evaluasi
   Memantau hasil pengendalian dan mengevaluasi kondisi lingkungan untuk memastikan faktor risiko tetap terkendali.

Dengan hasil sebanyak 1.993 pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan telah dilaksanakan dari target 1.717 pemeriksaan, dengan capaian 116%. Sementara itu, persentase faktor risiko lingkungan yang dikendalikan mencapai 100%.

D. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan bagian penting dalam pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan. Kegiatan dilakukan melalui pemantauan keberadaan dan kepadatan vektor, identifikasi kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan, serta tindakan pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit yang ditemukan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan dalam pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit:

1) Survei dan Pemantauan Vektor

   Melakukan pemantauan keberadaan dan kepadatan vektor di wilayah perimeter dan buffer pelabuhan.

2) Pemeriksaan Jentik dan Larva

   Melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan jentik atau larva nyamuk pada lokasi yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan.

3) Pemantauan Kepadatan Vektor

   Mengukur kepadatan vektor seperti pinjal, kecoak, dan lalat sebagai dasar penentuan tindakan pengendalian.

4) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

   Melaksanakan tindakan pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan.

5) Evaluasi Hasil Pengendalian

   Melakukan pemantauan kembali untuk memastikan tingkat kepadatan vektor berada dalam batas yang dipersyaratkan.

   Dengan hasil pengawasan menunjukkan seluruh indikator pengendalian vektor mencapai 100% meliputi, Indeks pinjal ≤ 1: 100%, Tidak ditemukan larva *Anopheles*: 100%, Kepadatan kecoak < 2: 100%, Kepadatan lalat < 2: 100%, HI perimeter = 0: 100%, HI buffer < 1: 100%.

Tim Kerja Pemeriksaan dan Pengendalian Faktor Risiko mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik dalam pemeriksaan, identifikasi, pengendalian, dan pemantauan faktor risiko kesehatan lingkungan secara konsisten. Pelaksanaan kegiatan pengamanan air dan makanan, pengawasan higiene sanitasi, pengawasan lingkungan, serta pengendalian vektor menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya lingkungan pelabuhan yang sehat dan aman serta mencegah penyebaran penyakit melalui pintu masuk negara.

4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus

Gambar 2. 4 Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus



Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus memiliki peran dalam melakukan pelayanan dan pengawasan kesehatan terhadap orang, baik pelaku perjalanan maupun kelompok sasaran lainnya di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.

Pelaksanaan tugas dilakukan melalui pelayanan kesehatan, pemeriksaan dan skrining penyakit serta faktor risiko kesehatan, vaksinasi internasional dan penerbitan ICV, penanganan kegawatdaruratan, serta dukungan kesehatan pada berbagai situasi khusus. Fungsi ini menjadi bagian dari upaya cegah tangkal penyakit dan perlindungan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara. Berikut kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan, dan situasi khusus, yaitu:

A. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di BBKK Tanjung Priok merupakan bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi pelaku perjalanan, awak kapal, penumpang, pekerja, serta masyarakat di wilayah kerja pelabuhan. Pelayanan diberikan melalui pemeriksaan kesehatan, pelayanan medis, rujukan, serta dukungan kesehatan sesuai kebutuhan, serta pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan BBKK Tanjung Priok untuk mengetahui kondisi kesehatan

seseorang secara dini melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis. Pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran dan pemeriksaan beberapa parameter kesehatan dasar, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi tubuh dan faktor risiko kesehatan yang dimiliki. Kegiatan pemeriksaan seperti :

- Pengukuran berat badan dan tinggi badan, untuk mengetahui kondisi fisik dan membantu menilai status berat badan.
- Pengukuran lingkar pinggang, untuk mengetahui gambaran distribusi lemak tubuh dan mendeteksi risiko kesehatan yang berkaitan dengan obesitas abdominal.
- Pemeriksaan tekanan darah (tensi), untuk mengetahui kondisi tekanan darah dan mendeteksi secara dini adanya tekanan darah yang berada di atas atau di bawah nilai normal.
- Pemeriksaan gula darah, untuk mengetahui kadar glukosa darah sebagai salah satu parameter dalam skrining risiko gangguan metabolisme dan diabetes.
- Pemeriksaan kolesterol, untuk mengetahui kadar kolesterol sebagai salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular.
- Pemeriksaan asam urat, untuk mengetahui kadar asam urat dalam darah sebagai bagian dari pemeriksaan kondisi kesehatan secara umum.

Hasil pemeriksaan dapat menjadi informasi awal bagi peserta mengenai kondisi kesehatannya dan menjadi dasar untuk memberikan edukasi kesehatan atau menyarankan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan hasil yang memerlukan perhatian.

B. Skrining Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan

Skrining penyakit dan faktor risiko kesehatan merupakan kegiatan untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan dan penyakit tertentu pada kelompok sasaran di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Kegiatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dan skrining terhadap penyakit yang memiliki risiko penularan, disertai edukasi serta tindak lanjut apabila ditemukan hasil yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada tahun 2025 ini, kegiatan skrining difokuskan antara lain pada HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut kegiatan skrining penyakit dan faktor risiko Kesehatan:

a. Skrining HIV/AIDS

Melakukan deteksi dini HIV/AIDS melalui kegiatan Mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) kepada kelompok sasaran di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Kegiatan juga disertai sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS. Dengan hasil 25 kali kegiatan Mobile VCT, 393 orang menjalani skrining, 393 orang non-reaktif dan Tidak ditemukan hasil reaktif HIV/AIDS.

b. Skrining Tuberkulosis (TB)

Melakukan deteksi dini terduga TB melalui skrining pada kelompok sasaran, disertai sosialisasi mengenai faktor risiko dan gejala TB. Hasil skrining terhadap peserta yang terindikasi kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan hasil 8 kali kegiatan skrining, 400 orang menjalani skrining, 46 orang terduga TB, Hasil pemeriksaan Rapid Test terhadap terduga TB tidak menunjukkan hasil reaktif.

Dengan kegiatan tersebut, BBKK Tanjung Priok tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga berupaya menemukan penyakit atau faktor risiko sedini mungkin sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penularan di wilayah pelabuhan dapat ditekan.

C. Vaksinasi dan Penerbitan ICV

BBKK Tanjung Priok melaksanakan pelayanan vaksinasi internasional sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan pelaku perjalanan lintas negara. Pelayanan meliputi vaksinasi Meningitis Meningokokus, Yellow Fever, dan Influenza, serta penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV/e-ICV). Untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan, BBKK Tanjung Priok memperkuat jejaring dan bekerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi dengan klinik dan rumah sakit, agar masyarakat bisa menjangkau dari lokasi yang terdekat. Berikut kegiatan Vaksinasi Internasional:

1) Pelaksanaan Vaksinasi Internasional

Pelayanan vaksinasi internasional merupakan salah satu upaya BBKK Tanjung Priok dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada pelaku perjalanan internasional. Pelayanan ini dilaksanakan melalui pemberian vaksin sesuai kebutuhan dan persyaratan perjalanan, Dengan hasil 4.627 dosis Vaksin Meningitis Meningokokus, 2.378 dosis vaksin Yellow Fever, 90 dosis vaksin Influenza, 82 dosis vaksin Tifoid (*Typhoid*), dan 2.737 dosis vaksin Polio.

2) Kerja Sama Jejaring Klinik dan Rumah Sakit

Untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan dan Masyarakat juga dapat menjangkau ketersediaan vaksinasi Klinik/RS di wilayah masing-masing BBKK Tanjung Priok memperkuat jejaring dengan klinik dan rumah sakit pelaksana vaksinasi internasional melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi prosedur, serta implementasi penerbitan e-ICV menggunakan aplikasi SINKARKES. Tahun 2025 BBKK Tanjung Priok sudah berkerjasama Klinik dan Rumah Sakit di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

D. Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Penanggulangan kegawatdaruratan dan situasi khusus merupakan bagian dari tugas Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi

Khusus BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan pelayanan kesehatan dan respons terhadap kondisi darurat yang dapat terjadi pada pelaku perjalanan, awak kapal, penumpang, maupun masyarakat di wilayah kerja Pelabuhan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kesiapsiagaan petugas, pelayanan kesehatan pada situasi khusus, penanganan awal kondisi kegawatdaruratan, rujukan pasien, serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait.

1) Kesiapsiagaan Kegawatdaruratan

   Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan petugas mampu memberikan respons awal terhadap kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera. Kegiatan meliputi:

   - Kesiapan petugas dan sarana pelayanan kesehatan.
   - Identifikasi kondisi kegawatdaruratan pada pelaku perjalanan dan awak kapal.
   - Pemberian pertolongan awal sesuai kebutuhan.
   - Koordinasi dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
   - Pemantauan kondisi kesehatan dalam situasi khusus.

   Kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

2) Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus

   Pelayanan kesehatan pada situasi khusus dilaksanakan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pelabuhan pada periode tertentu, seperti:

   - Hari Raya Idulfitri dan arus mudik–balik.
   - Natal dan Tahun Baru.
   - Kondisi KLB, wabah, atau kedaruratan kesehatan.
   - Situasi khusus lain yang membutuhkan dukungan pelayanan kesehatan.

   Pada pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan kondisi kesehatan, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, serta mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran penyakit di lingkungan pelabuhan.

3) Penanganan dan Rujukan Kegawatdaruratan

   Penanganan kegawatdaruratan dilakukan melalui pemberian pertolongan awal terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.

   Apabila kondisi pasien memerlukan pelayanan lebih lanjut, dilakukan koordinasi dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai. Proses ini bertujuan memastikan pasien memperoleh penanganan lanjutan secara tepat dan cepat. Dengan alur pelayanan:

- Identifikasi kondisi kegawatdaruratan
- Pemeriksaan dan pertolongan awal
- Penilaian kebutuhan rujukan
- Koordinasi dengan fasilitas kesehatan
- Pelaksanaan rujukan dan dokumentasi

4) Pengawasan Kesehatan pada Pelaku Perjalanan

Pengawasan kesehatan dilakukan terhadap penumpang, awak kapal, dan masyarakat yang berada di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini mendukung deteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui pengamatan kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan terbatas, skrining, serta tindak lanjut terhadap temuan yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja mencakup kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, skrining penyakit, vaksinasi, serta dukungan pelayanan pada situasi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BBKK Tanjung Priok dalam memastikan kesiapan menghadapi kondisi kesehatan yang berpotensi terjadi di pintu masuk negara.

5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

Gambar 2. 5 Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas



Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas memiliki peran dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BBKK Tanjung Priok.

Pelaksanaan tugas dilakukan melalui penguatan standar pelayanan, penyebarluasan informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), pengembangan inovasi pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pengguna layanan. Berikut kegiatan layanan public dan zona intergritas:

A. Pengembangan Layanan Publik

Pengembangan layanan publik merupakan upaya Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan mutu pelayanan kekarantinaan kesehatan secara berkelanjutan. Pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, hasil evaluasi, serta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang sesuai Moto BBKK Tanjung Priok SMART yaitu Sigap, Melayani, Akuntabel, Ramah, dan Transparan. Pengembangan layanan tidak hanya berfokus pada proses pelayanan, tetapi juga mencakup penyediaan informasi, peningkatan sarana komunikasi, pengelolaan pengaduan, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan.

Pengembangan layanan publik menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pelaksanaan kegiatan mendukung terciptanya pelayanan yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.

1) Evaluasi Pelaksanaan Layanan

Evaluasi Pelaksanaan Layanan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di BBKK Tanjung Priok berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

Evaluasi dilakukan dengan melihat pelaksanaan pelayanan secara nyata, mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian yang ditemukan, serta memperhatikan masukan dari masyarakat dan petugas pelayanan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan terhadap standar, prosedur, maupun informasi pelayanan agar pelayanan menjadi lebih jelas, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada pengguna layanan. Kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Pelayanan yang lakukan:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik
- Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam proses pelayanan
- Menyusun masukan dan rekomendasi untuk perbaikan layanan
- Meninjau kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar yang ditetapkan.

2) Penyempurnaan Standar dan Prosedur Pelayanan

Penyempurnaan standar dan prosedur pelayanan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan layanan publik di BBKK Tanjung Priok memiliki persyaratan, alur, waktu,

dan mekanisme pelayanan yang jelas serta mudah dipahami oleh pengguna layanan. Kegiatan penyempurnaan standar dan prosedur pelayanan yang dilakukan:

- Meninjau dan memperbarui standar pelayanan
- Menelaah kesesuaian persyaratan dan prosedur pelayanan
- Menyempurnakan alur dan mekanisme pelayanan
- Memperbarui informasi mengenai waktu dan biaya/tarif pelayanan
- Menyesuaikan informasi pelayanan dengan ketentuan yang berlaku
- Menyampaikan standar dan prosedur pelayanan melalui media informasi yang tersedia.

B. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya BBKK Tanjung Priok untuk membangun lingkungan kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaannya diarahkan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan dalam mendukung pembangunan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). WBBM adalah Predikat tertinggi yang diberikan Kementerian PANRB kepada unit kerja pemerintah yang sukses mencegah korupsi dan menghadirkan pelayanan publik prima serta modern. Sebagai bagian dari Zona Integritas (ZI), WBBM berada satu tingkat di atas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), dengan penekanan ekstra pada kualitas pelayanan yang inovatif. Kegiatan yang dilakukan dalam Pembangunan Zona Intergritas yaitu:

1) Penguatan manajemen perubahan dan budaya kerja berintegritas

   Penguatan manajemen perubahan dan budaya kerja berintegritas dilakukan untuk membangun pola kerja yang mendukung perubahan organisasi, meningkatkan komitmen pegawai, serta memastikan pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun Zona Integritas di lingkungan BBKK Tanjung Priok. Kegiatan yang dilakukan:

   - Penguatan komitmen pegawai terhadap pembangunan Zona Integritas
   - Internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas
   - Penerapan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan
   - Penguatan budaya antikorupsi dan pencegahan gratifikasi
   - Mendorong perubahan pola pikir dan pola kerja pegawai
   - Pemantauan dan evaluasi penerapan budaya kerja berintegritas.

2) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

   Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan untuk memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan BBKK Tanjung Priok memiliki target, indikator, serta hasil yang

dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan secara terarah.

3) Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi

   Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi dilakukan untuk memperkuat pengendalian internal serta memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan:

   - Penguatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan
   - Penguatan pemahaman dan budaya antikorupsi bagi pegawai
   - Pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan
   - Penguatan mekanisme pengaduan dan pelaporan dugaan pelanggaran
   - Penyediaan dan penyebarluasan informasi mengenai kanal pengaduan/Whistleblowing System
   - Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian serta tindak lanjut hasil pengawasan
   - Penguatan komitmen pegawai dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk memastikan layanan kekarantinaan kesehatan diberikan secara mudah, transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas melalui perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan kepuasan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan:

   - Evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan.
   - Peningkatan kemudahan akses informasi pelayanan
   - Pengembangan media informasi dan komunikasi pelayanan
   - Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan Masyarakat
   - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
   - Pengembangan inovasi pelayanan
   - Pemantauan dan evaluasi kualitas pelayanan secara berkala
   - Penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pengguna layanan.

5) Pemenuhan dan pengelolaan pada enam area perubahan Zona Integritas

Pemenuhan dan pengelolaan enam area perubahan Zona Integritas dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pembangunan Zona Integritas di BBKK Tanjung Priok terdokumentasi, terlaksana, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan melalui penyusunan, pemutakhiran, dan pengumpulan eviden sebagai bukti pelaksanaan program pada masing-masing area perubahan. Kegiatan yang dilakukan:

- Manajemen Perubahan -> penguatan komitmen, agen perubahan, dan budaya kerja
- Penataan Tata Laksana -> penyempurnaan proses bisnis dan prosedur kerja
- Penataan Manajemen SDM -> pengelolaan dan pengembangan kompetensi pegawai
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja -> pemantauan target, indikator, dan capaian kinerja
- Penguatan Pengawasan -> pengendalian internal dan pencegahan korupsi
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -> perbaikan standar pelayanan, pengaduan, SKM, dan inovasi pelayanan.

C. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari upaya BBKK Tanjung Priok untuk memastikan setiap keluhan, saran, dan masukan dari pengguna layanan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara tepat. Pengelolaan pengaduan juga menjadi sarana untuk mengetahui permasalahan dalam pelayanan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan pengaduan Masyarakat yaitu:

1) Penyediaan dan penyampaian informasi mengenai kanal pengaduan
2) Penerimaan keluhan, saran, masukan, dan apresiasi dari Masyarakat
3) Pencatatan dan pendokumentasian pengaduan yang diterima
4) Verifikasi dan identifikasi permasalahan yang disampaikan
5) Koordinasi dengan unit atau petugas terkait untuk penyelesaian pengaduan
6) Pemantauan tindak lanjut pengaduan sampai dengan penyelesaian
7) Evaluasi pengaduan sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan
8) Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai hak untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun apresiasi.

D. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh masukan dan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBKK Tanjung Priok. Hasil survei digunakan sebagai

bahan evaluasi untuk mengetahui aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan:

1) Penyusunan dan penyiapan instrumen SKM
2) Penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan
3) Pengumpulan data dan tanggapan dari pengguna layanan
4) Pengolahan dan analisis hasil survey
5) Identifikasi unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki
6) Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut hasil SKM
7) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

E. Pengelolaan Media Informasi

Pengelolaan media informasi dilakukan untuk memastikan informasi mengenai pelayanan, kegiatan, inovasi, dan program BBKK Tanjung Priok dapat disampaikan kepada masyarakat secara jelas, mudah diakses, dan berkelanjutan. Media informasi juga menjadi sarana untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kekarantinaan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan:

1) Pengelolaan dan pemutakhiran informasi pada website BBKK Tanjung Priok
2) Penyusunan dan penerbitan buletin sebagai media informasi
3) Publikasi informasi mengenai standar dan persyaratan pelayanan. Publikasi kegiatan, program, dan inovasi BBKK Tanjung Priok
4) Penyampaian informasi kesehatan dan edukasi kepada Masyarakat
5) Publikasi informasi pembangunan Zona Integritas
6) Penyampaian informasi mengenai kanal pengaduan Masyarakat
7) Pemantauan dan pembaruan konten agar informasi yang disampaikan tetap relevan dan mudah dipahami.

F. Pengembangan Inovasi Pelayanan

Pengembangan inovasi pelayanan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan gagasan, metode, atau media yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Inovasi dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan:

1) Identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pelayanan
2) Penyusunan dan pengembangan gagasan inovasi pelayanan
3) Pengembangan media atau metode pelayanan yang lebih efektif
4) Pemanfaatan teknologi dan media digital untuk mendukung pelayanan
5) Pengembangan media komunikasi seperti poster, leaflet, video, dan infografis
6) Publikasi dan penyebarluasan inovasi kepada pengguna layanan

7) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi
8) Penyempurnaan inovasi berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pengguna layanan.

6. Administrasi Umum

Gambar 2. 6 Tim Kerja Administrasi Umum



Administrasi Umum merupakan bagian yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Tanjung Priok melalui pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta kebutuhan administrasi lainnya. Dukungan administrasi yang tertib membantu memastikan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut bagian Administrasi Umum yaitu:

A. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan kegiatan untuk memastikan seluruh administrasi pegawai BBKK Tanjung Priok tercatat, terdokumentasi, dan terkelola dengan tertib sesuai ketentuan. Pengelolaan ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai serta kebutuhan administrasi organisasi. Kegiatan yang dilakukan:

1) Pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian.
2) Pengelolaan administrasi surat dan dokumen kepegawaian.
3) Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
4) Pengelolaan administrasi cuti dan izin pegawai.
5) Pengelolaan administrasi mutasi dan penempatan pegawai.
6) Pengelolaan administrasi pengembangan kompetensi dan pelatihan.
7) Pengelolaan administrasi disiplin dan kehadiran pegawai.
8) Penyusunan dan penyampaian laporan kepegawaian.
9) Penataan dan pengarsipan dokumen kepegawaian.

B. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan kegiatan untuk memastikan seluruh aset negara yang digunakan oleh BBKK Tanjung Priok tercatat, terinventarisasi, terpelihara, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Pengelolaan BMN mendukung ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan:

1) Inventarisasi dan pemutakhiran data BMN.
2) Pencatatan dan pengadministrasian barang.
3) Pemeriksaan dan pengecekan kondisi BMN secara berkala.
4) Penatausahaan BMN melalui aplikasi yang digunakan pemerintah.
5) Pengelolaan pemanfaatan dan penggunaan BMN.
6) Pemeliharaan dan pengamanan BMN.
7) Pengelolaan pemindahan, penghapusan, atau pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan.
8) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMN.
9) Penataan dokumen dan bukti kepemilikan BMN.
10) Monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN untuk memastikan aset digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya.

C. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas dan arsip

Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, dan arsip dilakukan untuk memastikan proses administrasi kedinasan di BBKK Tanjung Priok berjalan tertib, efektif, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Kegiatan ini mendukung kelancaran komunikasi kedinasan serta ketersediaan dokumen sebagai bukti pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi. Kegiatan yang dilakukan:

1) Penerimaan dan pencatatan surat masuk
2) Pengelolaan dan pencatatan surat keluar
3) Pengelolaan disposisi dan tindak lanjut surat
4) Penyusunan dan pemeriksaan tata naskah dinas
5) Pengelolaan dokumen melalui sistem persuratan kedinasan, termasuk SRIKANDI
6) Penomoran, pengklasifikasian, dan pendistribusian naskah dinas
7) Pengarsipan dokumen dan naskah dinas secara tertib
8) Penataan arsip aktif dan arsip inaktif
9) Pemeliharaan dan pengamanan arsip
10) Pencarian dan penyediaan kembali arsip yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pemeriksaan
11) Penyusutan dan penghapusan arsip/dokumen sesuai ketentuan kearsipan dan jadwal retensi arsip.

D. Pengelolaan administrasi keuangan

Pengelolaan administrasi keuangan merupakan kegiatan untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan BBKK Tanjung Priok dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan. Pengelolaan ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang dilakukan:

1) Pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran.
2) Penatausahaan dan pencatatan transaksi keuangan.
3) Pengelolaan dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan.
4) Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pembayaran.
5) Pengelolaan pengeluaran PNBP dan RM.
6) Pemantauan realisasi anggaran dan capaian penggunaan anggaran.
7) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.
8) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.
9) Penatausahaan dan pengarsipan dokumen keuangan.
10) Tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan

E. Pengelolaan administrasi perencanaan, program dan pelaporan

Pengelolaan administrasi perencanaan, program, dan pelaporan merupakan kegiatan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan program serta kegiatan BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini memastikan program yang dilaksanakan memiliki perencanaan yang jelas, target yang terukur, serta dokumentasi dan pelaporan yang tertib. Kegiatan yang dilakukan:

1) Penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan.
2) Penyusunan dan pemutakhiran target serta indikator kinerja.
3) Penyusunan Rencana Kerja (RKT) dan dokumen pendukung perencanaan.
4) Penyusunan dan pemutakhiran dokumen RKA-K/L dan DIPA sesuai kebutuhan.
5) Pengumpulan dan pengelolaan data capaian kinerja.
6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
7) Penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
8) Pengumpulan dan penataan data dukung serta eviden pelaksanaan kegiatan.
9) Penyusunan bahan untuk rapat evaluasi dan monitoring kinerja.
10) Tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program.

F. Pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran

Pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dilakukan untuk memastikan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di BBKK Tanjung Priok tersedia, berfungsi dengan baik, dan terpelihara secara optimal. Pengelolaan ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman serta menunjang kelancaran operasional organisasi. Kegiatan yang dilakukan:

1) Inventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana perkantoran.
2) Pemantauan kondisi dan ketersediaan fasilitas kantor.
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.
4) Pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi.
5) Pengelolaan penggunaan fasilitas dan ruang perkantoran.
6) Penanganan kerusakan dan kebutuhan perbaikan fasilitas.
7) Pengamanan dan penataan sarana prasarana kantor.
8) Monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memastikan penggunaannya efektif dan sesuai peruntukan.

7. Wilayah Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok didukung oleh lima Wilayah Kerja yang tersebar di kawasan pelabuhan. Wilayah kerja tersebut berperan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan faktor risiko kesehatan, surveilans kekarantinaan kesehatan, serta pelayanan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, orang, dan barang. Pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah kerja dilakukan secara terkoordinasi dengan kantor induk dan lima Tim Kerja, sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah. Keberadaan wilayah kerja Pelabuhan Marunda menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Berikut lima wilayah kerja BBKK Tanjung Priok:

A. Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda

Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan kegiatan di wilayah ini mencakup pelayanan dokumen kekarantinaan kesehatan, pengawasan kesehatan alat angkut, serta pelayanan kesehatan tertentu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2. 7 Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda





Sumber : https://mctport.com/

Dalam melaksanakan tugasnya, Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda didukung oleh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi yang menjalankan pelayanan secara terkoordinasi. Pelayanan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara. Petugas yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda terdiri atas tujuh orang dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda

No	Nama	Tugas
1	Junita Manik, S.KM, M.Kes	Kepala Wilayah Kerja Marunda
2	dr. Rienny Esta Mardiani	Dokter
3	Ita Amelia, S.Kep	Administrasi
4	Holong J M Tanjung	Perawat
5	Ibnu Arli	Perawat
6	Reynaldo	Entomolog Kesehatan
7	Mansyur Rahman	Perawat

Berikut jenis Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Wilayah Kerja Marunda:

1) Pelayanan Dokumen Kesehatan Alat Angkut
   - Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
   - Penerbitan COP *(Certificate of Pratique)*
   - Penerbitan PHQC *(Port Health Quarantine Clearance)*
   - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
   - Penerbitan SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*

2) Pelayanan Dokumen Kesehatan Orang dan Barang

- Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
- Penerbitan Surat Keterangan Sehat
- Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah.
- Penerbitan *Health Certificate*

Melalui dukungan sumber daya manusia dan pelaksanaan berbagai jenis pelayanan tersebut, Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda berperan dalam mendukung penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan pelayanan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas kepelabuhanan serta memperkuat upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.

B. Wilayah Kerja Pelabuhan Kali Baru

Gambar 2. 8 Wilayah Kerja Pelabuhan Kali Baru



Sumber : https://money.kompas.com/read/2025/02/27/145032626/terus-digarap-proyek-terminal-kalibaru-tahap-1b-capai-75-persen?page=all

Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru merupakan salah satu wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Kegiatan pelayanan di wilayah Pelabuhan Kalibaru meliputi penerbitan dokumen kesehatan alat angkut, pelayanan dokumen kesehatan bagi orang dan barang, serta pengawasan faktor risiko kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru didukung oleh tenaga kesehatan dengan latar belakang keahlian yang beragam. Sinergi antarpetugas menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelayanan, pengawasan faktor risiko kesehatan, serta upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Petugas yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru terdiri atas lima orang, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru

No	Nama	Tugas
1	Robiur Rosyid, SKM, MKM	Kepala Wilayah Kerja Kalibaru
2	Indra Felani, SKM	Perawat
3	Junita Manjasari Mandang, SKM	Sanitarian
4	Hanafi Daulay	Perawat
5	Masyita, S.Farm, Apt	Epidemiolog

Berikut jenis Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Wilayah Kerja Marunda:

1) Pelayanan Dokumen Kesehatan Alat Angkut
   - Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
   - Penerbitan COP *(Certificate of Pratique)*
   - Penerbitan PHQC *(Port Health Quarantine Clearance)*
   - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
   - Penerbitan SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*
2) Pelayanan Dokumen Kesehatan Orang dan Barang
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Melalui dukungan sumber daya manusia dan pelaksanaan pelayanan kekarantinaan kesehatan, Wilayah Kerja Pelabuhan Kalibaru berperan dalam mendukung pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan pelayanan yang tertib, profesional, dan sesuai ketentuan diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas kepelabuhanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara.

C. Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol

Gambar 2. 9 Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol





Sumber : https://www.beritadaerah.co.id/index.php/2020/10/13/pelabuhan-sunda-kelapa-miliki-nilai-sejarah-yang-tinggi/

Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang melaksanakan dukungan pelayanan dan pengawasan kekarantinaan kesehatan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa dan wilayah pelayanan terkait. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelayanan dokumen kesehatan alat angkut, pelayanan kesehatan orang, serta pengawasan sesuai tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang keperawatan, entomologi kesehatan, dan epidemiologi kesehatan. Dukungan sumber daya manusia tersebut berperan dalam menunjang kelancaran pelayanan, deteksi dini faktor risiko kesehatan, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara. Wilayah Kerja Sunda Kelapa didukung oleh enam orang petugas dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa

No	Nama	Tugas
1	dr. Regina Listyarini A.	Kepala Wilayah Sunda Kelapa
2	Jihan Mutiara Sari, SKM	Entomolog Kesehatan
3	Afriani	Perawat
4	Sutri Agung Hartaningsih	Epidemiolog Kesehatan
5	Yessi Mariana Gultom	Epidemiolog Kesehatan
6	Arteryalbino	Epidemiolog Kesehatan

Berikut jenis Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Wilayah Kerja Sunda Kelapa:

1) Pelayanan Dokumen Kesehatan Alat Angkut
   - Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
   - Penerbitan COP *(Certificate of Pratique)*
   - Penerbitan PHQC *(Port Health Quarantine Clearance)*
   - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
   - Penerbitan SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*
2) Pelayanan Dokumen Kesehatan Orang
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
   - Penerbitan Surat Keterangan Sehat
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Melalui dukungan tenaga kesehatan dan pelaksanaan berbagai jenis pelayanan tersebut, Wilayah Kerja Pelabuhan Sunda Kelapa berperan dalam mendukung pengawasan serta pelayanan kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan kegiatan secara profesional dan terkoordinasi diharapkan dapat memperkuat upaya cegah tangkal penyakit serta mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan.

D. Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman

Gambar 2. 10 Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman



Sumber : https://www.merahputih.com/post/read/melihat-kemegahan-pelabuhan-muara-baru-di-pesisir-jakarta

Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman merupakan salah satu wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Kegiatan pelayanan di wilayah Pelabuhan Samudra Nizam Zachman meliputi pelayanan dokumen kesehatan alat angkut, pelayanan dokumen kesehatan orang, serta pengawasan faktor risiko kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi BBKK Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman didukung oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang keperawatan, sanitasi, dan epidemiologi kesehatan. Kolaborasi antarpetugas menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kekarantinaan kesehatan serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara. Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman didukung oleh lima orang petugas dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Petugas di Wilayah Kerja Samudra Nizam Zachman

No	Nama	Tugas
1	Cahyono Edi Nugroho, SKM	Kepala Wilayah Samudra Nizam Zachman
2	Siti Rianasari	Perawat
3	Hasmuliati	Perawat
4	M Amnurokhim Malahade, SKM	Sanitarian
5	Briyan Suhepri	Epidemiolog Kesehatan

Berikut jenis Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Wilayah Kerja Samudra Nizam Zachman:

1) Pelayanan Dokumen Kesehatan Alat Angkut
   - Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
   - Penerbitan PHQC *(Port Health Quarantine Clearance)*
   - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
   - Penerbitan SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*
2) Pelayanan Dokumen Kesehatan Orang
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
   - Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Melalui dukungan sumber daya manusia dan pelaksanaan pelayanan kekarantinaan kesehatan, Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman berperan dalam mendukung pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan pelayanan yang profesional, tertib, dan terkoordinasi diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas kepelabuhanan serta memperkuat upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.

E. Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara

Gambar 2. 11 Wilayah Kerja Pelabuhan Samudra Nizam Zachman



Sumber : https://ppurban.co.id/id/portfolio/dermaga-pelabuhan-muara-angke-2/

Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke merupakan salah satu wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelayanan yang dilaksanakan meliputi penerbitan dokumen kesehatan alat angkut, pelayanan dokumen kesehatan orang, serta kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi BBKK Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke didukung oleh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dengan pembagian tugas sesuai kompetensi masing-masing. Dukungan tersebut berperan dalam menunjang kelancaran pelayanan, pengawasan faktor risiko kesehatan, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara. Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke didukung oleh tujuh orang petugas dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Petugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke

No	Nama	Tugas
1	Enizarti, SKM, MKM	Kepala Wilayah Muara Angke
2	Fery Anthony, SKM, MKM	Entomolog Kesehatan
3	Dedi Sutardi, SK	Epidemiolog Kesehatan
4	Luh Ayu Kridayanti	Perawat
5	Muhammad Fardhy Nur Wahid	Perawat
6	Gensian Kuncoro Yekti P H	Perawat
7	Markus	Administrasi

Berikut jenis Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Wilayah Kerja Muara Angke:

1) Pelayanan Dokumen Kesehatan Alat Angkut
    - Penerbitan Sertifikat P3K Kapal
    - Penerbitan COP *(Certificate of Pratique)*
    - Penerbitan PHQC *(Port Health Quarantine Clearance)*
    - Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
    - Penerbitan SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*
2) Pelayanan Dokumen Kesehatan Orang
    - Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
    - Penerbitan Surat Keterangan Sakit
    - Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Melalui dukungan sumber daya manusia dan pelaksanaan berbagai pelayanan kekarantinaan kesehatan, Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke berperan dalam

mendukung pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan pelayanan secara profesional, tertib, dan terkoordinasi diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas kepelabuhanan serta memperkuat upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.

BAB III
PENUNJANG KEGIATAN

1. Keuangan

Pada tahun anggaran 2025, DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok memiliki pagu anggaran sebesar Rp35.118.444.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BBKK Tanjung Priok dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, pelayanan publik, serta kegiatan penunjang organisasi. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp29.117.583.519,-. Berdasarkan perhitungan terhadap pagu efektif setelah memperhitungkan penyesuaian anggaran, realisasi anggaran mencapai 99,24%. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Tabel 3. 1 Realisasi DIPA dan penerimaan PNBP

No	Uraian	Tahun 2025		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	DIPA 2025	35.118.444.000	29.117.583.519	82,91%
2	PNBP	6.180.900.000	11.428.543.901	184,90%

Selain pengelolaan anggaran, BBKK Tanjung Priok juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian dari pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp6.180.900.000,-, sedangkan realisasi penerimaan mencapai Rp11.428.543.901,- atau 184,90% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya realisasi penerimaan dari layanan yang diberikan BBKK Tanjung Priok selama tahun 2025.

2. Program dan Laporan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melakukan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan program dan laporan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian target kinerja serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Pada tahun 2025, dokumen program dan laporan yang disusun antara lain:

1) Dokumen Anggaran RKA-K/L dan DIPA
2) Laporan Tahunan
3) Laporan Keuangan

4) Laporan Barang Milik Negara (BMN)
5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6) Buku Profil BBKK Tanjung Priok
7) Dokumen/Proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8) Dokumen Kepegawaian, termasuk dokumen kontrak dan penilaian SKP
9) Dokumen e-Monev DJA
10) Dokumen e-Monev Bappenas
11) Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action (POA)
12) Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja
13) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)
14) Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
15) Dokumen pengumpulan, pengolahan, dan analisis data capaian indikator kinerja

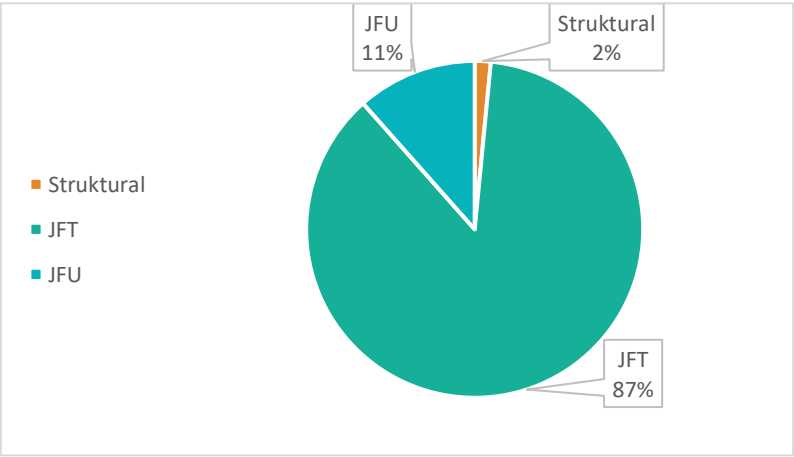
Kegiatan penyusunan program dan laporan tersebut meliputi perencanaan kegiatan dan anggaran, pengumpulan data capaian kinerja, pemantauan pelaksanaan program, evaluasi hasil kegiatan, penyusunan laporan, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

1) Menurut Jabatan

Grafik 3. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan



Dari grafik 3.1 terlihat diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 2 orang (2%), Jabatan fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 113 orang (87%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 15 orang (11%).

Tabel 3. 2 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok	1
2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
3	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JFT)	2
4	Analis Anggaran Ahli Pertama (JFT)	1
5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	1
7	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JFT)	1
8	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis/Pranata Kearsipan (JFU)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
11	Arsiparis Terampil (JFT)	2
12	Dokter Ahli Madya (JFT)	3
13	Dokter Ahli Muda (JFT)	10
14	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	4
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
17	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	3
19	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
20	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	11
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	7
22	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
23	Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JFT)	2
24	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	5
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	1
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya (JFT)	1
27	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	2
28	Asisten Perawat (JFU)	1
29	Perawat Mahir (JFT)	7
30	Perawat Penyelia (JFT)	5
31	Perawat Terampil (JFT)	7

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
32	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
33	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
34	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1
35	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1
36	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JFT)	1
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	1
38	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	3
39	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	5
40	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	6
41	Sanitarian Mahir (JFT)	4
42	Sanitarian Penyelia (JFT)	1
43	Sanitarian Terampil (JFT)	1
44	Pengelola Instalasi Air dan Listrik (JFU)	1
45	Pengemudi (JFU)	1
46	Operator Layanan Operasional (SMU) (JFU)	5
47	Penata Layanan Operasional (JFU)	1
	Total	**130**

2) Menurut Pendidikan

Tabel 3. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Menengah Pertama	1
2	Sekolah Menengah Atas	6
3	SPK	2
5	Akademi Kesehatan Lingkungan	1
6	D.III Keperawatan	17
7	D.III Farmasi	3
8	D.III Kesehatan Lingkungan	13
9	D.III Analis Kesehatan	2
10	D.III Teknik Radiologi	1
11	D. III Kebidanan	1
12	D.III Teknik Komputer Teknik Elektro	1
13	D.III Akuntansi	3

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
14	D.IV Kesehatan Lingkungan	1
15	S.1 Kedokteran Umum	9
16	S.1 Keperawatan	2
17	S.1 Farmasi	2
18	S.1 Kesehatan Masyarakat	33
19	S.1 Entomolog	1
20	S.1 Ekonomi	2
21	S.1 Akuntansi	2
22	S.1 Teknik Informatika	1
23	Apoteker	1
24	S.2 Kesmas/Kesling	22
25	S.2 MSi	1
26	Magister/Master	1
27	S.3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	1
TOTAL		**130**

4. Sarana dan Prasaranan

Tabel 3. 4 Sarana dan prasarana

No	Nama Sarpras	Luas (m^2) / Unit	Status Gedung	Status Tanah
1	Kantor Induk			
	Gedung A	2.450	Kemenkes RI	PT. Pelindo II
	Gedung B	579, 80	PT. Pelindo II	PT. Pelindo II
	Gedung C	627	PT. Pelindo II	PT. Pelindo II
	Pos Satpam	32	PT. Pelindo II	PT. Pelindo II
2	Wilayah Kerja			
	Sunda Kelapa	385 + 42 = 427	Kemenkes RI	PT. Pelindo II
	Marunda	385	Kemenkes RI	KBN Marunda

No	Nama Sarpras	Luas (m^2) / Unit	Status Gedung	Status Tanah
	Muara Baru	96,46	Kemenkes RI	Kemenkes RI
	Muara Angke	22, 50	Pemda DKI UP3 Muara Angke	Pemda DKI
	Kali Baru	41	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
3	Tanah untuk Pendidikan dan Pelatihan	15.639	-	Kemenkes RI
4	Tanah Bangunan Rumah Dinas	732	Kemenkes RI	Kemenkes RI
5	Gedung dan Bangunan Rumah Dinas	152	Kemenkes RI	Kemenkes RI
6	Kendaraan Operasional	total 31 unit sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 30 unit		
	Mobil Ambulance	12 unit Sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 11 unit		
7	Perangkat Pengolah Data (PC, Laptop, Printer)	207 unit		

5. Penghargaan yang diterima

Sepanjang tahun 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mendapatkan penghargaan yaitu:

1. Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

   Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen BBKK Tanjung Priok dalam melaksanakan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tertib, tepat waktu, lengkap, dan akuntabel. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dalam

mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 3. 1 Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik BBKK Tanjung Priok



BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan BBKK Tanjung Priok selama Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1) Pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan telah berjalan secara menyeluruh melalui kegiatan surveilans epidemiologi, pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, pelayanan kesehatan, penindakan pelanggaran, serta kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan fungsi BBKK dalam melakukan pengawasan, pencegahan, respons, pengelolaan data, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi.
2) Kegiatan surveilans epidemiologi dan deteksi dini telah terlaksana dengan baik. Selama Tahun 2025, BBKK Tanjung Priok melakukan pemantauan kesehatan pada kapal, awak kapal, penumpang, dan wilayah kerja. Sebanyak 10 dari 10 sinyal KLB dan bencana berhasil direspons dalam waktu kurang dari 24 jam, serta dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kejadian kesehatan yang memerlukan tindak lanjut.
3) Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang telah dilaksanakan secara optimal. Kegiatan meliputi pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan dokumen kesehatan, pengawasan OMKABA, penerbitan dokumen kekarantinaan, serta tindakan penyehatan alat angkut. Pada Tahun 2025 tercatat 50.492 alat angkut diperiksa dan 82 kapal mendapatkan tindakan penyehatan, terdiri atas 65 kapal melalui fumigasi dan 17 kapal melalui desinseksi.
4) Pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan telah dilaksanakan secara konsisten, meliputi pengawasan kualitas air, higiene dan sanitasi, lingkungan, serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Berbagai indikator pengendalian lingkungan dan vektor yang disajikan dalam profil menunjukkan capaian sesuai target, termasuk pengendalian vektor yang mencapai 100%.
5) Pelayanan kesehatan dan pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang telah mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan. Kegiatan meliputi pelayanan kesehatan, vaksinasi, skrining penyakit, pemeriksaan kesehatan, serta dukungan pada situasi kegawatdaruratan dan situasi khusus. Kegiatan skrining HIV/AIDS dan TB juga dilaksanakan sebagai bagian dari deteksi dini penyakit pada kelompok sasaran.

6) Kinerja organisasi secara keseluruhan menunjukkan capaian yang baik. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Tahun 2025, delapan indikator kinerja BBKK Tanjung Priok menghasilkan rata-rata capaian sebesar 107,17%. Beberapa indikator utama juga menunjukkan capaian di atas target, antara lain indeks deteksi faktor risiko, nilai kinerja anggaran, IKPA, implementasi WBK, dan peningkatan kompetensi ASN.
7) Pengelolaan PNBP menunjukkan capaian yang positif. Target PNBP Tahun 2025 sebesar Rp6.180.900.000, sedangkan realisasi mencapai Rp11.428.543.901 atau 184,90%. Capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan kekarantinaan kesehatan yang menghasilkan PNBP.
8) Pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas terus diperkuat. Upaya dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan pengaduan, keterbukaan informasi, pengembangan inovasi, serta penguatan enam area perubahan Zona Integritas. Pada Tahun 2025, hasil self-assessment implementasi WBK tercatat sebesar 89,86.
9) Sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, serta jejaring kerja menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas BBKK Tanjung Priok. Dengan karakteristik Tanjung Priok sebagai kawasan dengan mobilitas orang, alat angkut, dan barang yang tinggi, dukungan terhadap kapasitas SDM, teknologi, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat.
10) Secara keseluruhan, Profil BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah berjalan dalam mendukung cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara, sekaligus menjadi bahan informasi dan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Profil sendiri disusun sebagai media informasi mengenai kelembagaan, sumber daya, wilayah kerja, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan BBKK Tanjung Priok.

2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Tanjung Priok pada tahun berikutnya adalah:

1) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis kekarantinaan kesehatan, surveilans epidemiologi, pelayanan publik, pengelolaan data, serta pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas khusus seperti PPNS.
2) Memperkuat sistem surveilans dan deteksi dini melalui optimalisasi pemanfaatan data, pengembangan sistem informasi, peningkatan kualitas analisis data, serta penguatan mekanisme respons cepat terhadap sinyal KLB, wabah, bencana, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

3) Meningkatkan kualitas dan keandalan jaringan teknologi informasi, terutama untuk mendukung pelayanan berbasis aplikasi, penerbitan dokumen kekarantinaan secara elektronik, pengelolaan data surveilans, serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
4) Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional di kantor induk maupun wilayah kerja, termasuk perangkat pelayanan, kendaraan operasional, peralatan pemeriksaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
5) Memperkuat perencanaan kebutuhan logistik pelayanan, khususnya vaksin, reagen, bahan pemeriksaan, dan kebutuhan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan tren dan fluktuasi permintaan agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga.
6) Memperkuat jejaring dan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran, instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat pengawasan dan pencegahan masuk serta keluarnya penyakit melalui pintu masuk negara.
7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan akses informasi, pengelolaan pengaduan yang responsif, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa.
8) Memperkuat pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan melalui peningkatan implementasi enam area perubahan, penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan kualitas eviden, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan upaya BBKK Tanjung Priok dalam memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
9) Mengoptimalkan pengelolaan media informasi publik, termasuk website, media sosial, buletin, banner, leaflet, infografis, dan media komunikasi lainnya sebagai sarana edukasi, transparansi informasi, publikasi kinerja, serta penyebarluasan informasi kekarantinaan kesehatan.
10) Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penggunaan anggaran dengan memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai prioritas, target, dan kebutuhan organisasi sehingga dukungan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian kinerja.
11) Mengoptimalkan kegiatan penjangkauan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, pelaku perjalanan, awak kapal, pekerja pelabuhan, serta kelompok sasaran lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan.

Kemenkes
BBKK Tanjung Priok

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK

Menjaga Pintu Masuk Negara
untuk Indonesia yang Sehat dan Tangguh



Jalan Nusantara Raya No.2,
Pelabuhan, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310

0811-1181-0400

www.bbkktanjungpriok.com

BBKK Tanjung Priok

CEGAH TANGKAL | PELAYANAN BERKUALITAS | KOLABORASI LINTAS SEKTOR | INDONESIA SEHAT DAN TANGGUH